

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu yang dikaji dapat memberikan kontribusi yang berbeda-beda bagi peneliti, mulai dari aspek proses hingga hasil serta pemahaman keberadaan dan kedudukan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam memperluas materi yang disiapkan peneliti untuk penelitian ini dan menghindari asumsi kesamaan dalam penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Ranitya Ganindha, 2020, yang berjudul “Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikasi geografis produk pertanian”, penelitian Yuridis Empiris dengan penafsiran kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sesuai dengan amanat Undang-Undnag, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran Indi- kasi Geografis atas Produk daerahnya. Minimnya pendafataran Indikasi Geografis salah satunya di- sebabkan oleh kurangnya peran Pemerintah daerah dalam proses pembinaan.
2. Penelitian yang dilakukan Abd. Rahman, dkk, 2022, yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kopi Arabika di Kabupaten Gowa”, Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Temuan

penelitian, pertama; Peran regulator di mana pemerintah kelurahan membangun jejaring kemitraan dengan dinas-dinas terkait sebagai upaya dalam menjembatani dan membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan. Kedua, peran fasilitator dalam hal pembinaan kelompok tani serta fasilitasi proposal bantuan dana. Ketiga, peran dinamisor melalui penyuluhan, pengarahan serta pendampingan terkait upaya-upaya pengembangan kopi arabika.

3. Penelitian yang dilakukan Melkianus Y. Asso, 2020, yang berjudul “Pemberdayaan Petani Kopi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Yagara Kecamatan Walesi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua”, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani kopi yang dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian di Kecamatan Walesi Kabupaten Jayawijaya dengan 1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 2) meningkatkan kualitas hasil produksi dan pemasaran 3) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana.
4. Penelitian yang dilakukan Jujur T N Sitanggang, 2013, yang berjudul “Pengembangan Potensi Kopi Sebagai Komoditas Unggulan Kawasan Agropolitan Kabupaten Dairi”, Metode yang digunakan untuk mencari strategi yang tepat adalah metode analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kopi; (2) Peningkatan peran pemerintah; (3) Terbentuknya

Gabungan Petani Kopi Kabupaten Dairi; (4) Implementasi Konsep Pengembangan Agropolitan Kabupaten Dairi di Kabupaten Kopi Dairi.

5. Penelitian yang dilakukan Elysha Novi Juliyanti, 2022, yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Kopi Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Produksi Dan Nilai Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Petani Kopi Di Desa Kenali Kecamatan Belalau Lampung Barat)”, Penelitian ini menggunakan perspektif Pendekatan kualitatif yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data primer yang objek utamanya adalah petani kopi. Hasil dari penelitian ini adalah, pemerintah memiliki peran dalam pemberdayaan petani kopi di Desa Kenali, yaitu sebagai penyedia layanan, fungsi pengaturan, serta fungsi pembangunan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh petani dalam meningkatkan hasil produksi dan nilai jual adalah rutin mengikuti kegiatan penyuluhan, menggunakan pupuk yang berkualitas, menambah wawasan melalui sosialisasi serta melakukan penjualan langsung ataupun melalui agen.

Adapun untuk mempermudah memahami uraian penelitian terdahulu, berikut adalah penyajian tabel riset terdahulu.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Fokus/Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ranitya Ganindha, 2020	Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikasi geografis produk pertanian	Kabupaten Malang	Penelitian Yuridis Empiris dengan penafsiran kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sesuai dengan amanat Undang-Undnag, Pemerintah Daerah memiliki

					kewenangan untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis atas Produk daerahnya. Minimnya pendaftaran Indikasi Geografis salah satunya disebabkan oleh kurangnya peran Pemerintah daerah dalam proses pembinaan
2	Abd. Rahman, dkk, 2022	Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kopi Arabika di Kabupaten Gowa	Kabupaten Gowa	Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi	Temuan penelitian, pertama; Peran regulator di mana pemerintah kelurahan membangun jejaring kemitraan dengan dinas-dinas terkait sebagai upaya dalam menjembatani dan membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan. Kedua, peran fasilitator dalam hal pembinaan kelompok tani serta fasilitasi proposal bantuan dana. Ketiga, peran dinamisor melalui penyuluhan, pengarahan serta pendampingan terkait upaya-upaya pengembangan kopi arabika
3	Melkianus Y. Asso, 2020	Pemberdayaan Petani Kopi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Yagara Kecamatan Walesi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua	Desa Yagara Kecamatan Walesi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani kopi yang dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian di Kecamatan Walesi Kabupaten Jayawijaya dengan 1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 2) meningkatkan kualitas hasil produksi dan pemasaran 3) meningkatkan kuantitas dan kualitas

					sarana dan prasarana.
4	T N Sitanggang, 2013	Pengembangan Potensi Kopi Sebagai Komoditas Unggulan Kawasan Agropolitan Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi	Metode yang digunakan untuk mencari strategi yang tepat adalah metode analisis SWOT	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kopi; (2) Peningkatan peran pemerintah; (3) Terbentuknya Gabungan Petani Kopi Kabupaten Dairi; (4) Implementasi Konsep Pengembangan Agropolitan Kabupaten Dairi di Kabupaten Kopi Dairi
5	Elysha Novi Juliyanti, 2022	Analisis Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Kopi Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Produksi Dan Nilai Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Petani Kopi Di Desa Kenali Kecamatan Belalau Lampung Barat)	Desa Kenali Kecamatan Belalau Lampung Barat	Penelitian ini menggunakan perspektif Pendekatan kualitatif yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data primer yang objek utamanya adalah petani kopi	Hasil dari penelitian ini adalah, pemerintah memiliki peran dalam pemberdayaan petani kopi di Desa Kenali, yaitu sebagai penyedia layanan, fungsi pengaturan, serta fungsi pembangunan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh petani dalam meningkatkan hasil produksi dan nilai jual adalah rutin mengikuti kegiatan penyuluhan, menggunakan pupuk yang berkualitas, menambah wawasan melalui sosialisasi serta melakukan penjualan langsung ataupun melalui agen

Sumber : Diolah peneliti, 2024

Berdasarkan penelitian terdahulu pada tabel 2.1 tersebut di atas, perbedaan yang ada diantaranya adalah pokok masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, sumber informasi, dan hasil penelitian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Peranan Pemerintah Daerah

2.2.1.1 Pengertian Peranan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan, khususnya dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut Soejono Soekanto (2012:212) dalam buku berjudul Sosiologi, Suatu Pengantar, menjelaskan pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya, maka ia sedang menjalankan suatu peran. Perbedaan kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Seperti halnya kedudukan, peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai peran yang berbeda-beda yang berasal dari pola sosialnya. Hal ini juga berarti bahwa peran menentukan apa yang dilakukannya bagi masyarakat dan peluang apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Peran adalah serangkaian perilaku yang teratur, yang timbul karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu jabatan yang mudah dikenali. Kepribadian seseorang juga dapat sangat mempengaruhi bagaimana suatu peran harus dijalankan. Peran muncul karena seseorang memahami bahwa dirinya tidak bekerja sendirian. Memiliki lingkungan di mana Anda perlu berinteraksi setiap saat. Lingkungannya luas dan beragam, dan masing-masing akan memiliki

lingkungan yang berbeda. Namun peran yang harus dimainkan pada hakikatnya tidak berbeda dengan Miftah Thoha (2012:10).

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen dan buku Leadership in Management yang ditulis Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), terdapat tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi, yaitu:

a. Peran Interpersonal, dalam peran interpersonal atasan harus berperan sebagai figur, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dipimpinnya berjalan lancar. Mintzberg membagi peran ini menjadi tiga peran yang merupakan rincian lebih lanjut dari peran interpersonal ini. Ketiga peran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai tokoh (Figurhead), yaitu peran yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap peluang dan permasalahan yang muncul secara formal.
- 2) Berperan sebagai pemimpin (Leader), dalam peran ini atasan berperan sebagai pemimpin. Ia melaksanakan hubungan interpersonal dengan orang-orang yang dipimpinnya, dengan menjalankan fungsi-fungsi pokok antara lain kepemimpinan, pemberian motivasi, pengembangan, dan pengendalian.
- 3) Berperan sebagai pejabat perantara (Liaison Manager), disini atasan berperan berinteraksi dengan rekan kerja, staf dan orang di luar organisasi, untuk memperoleh informasi.

b. Peran yang berkaitan dengan informasi (Informational Role), peran interpersonal di atas menempatkan atasan pada posisi yang unik dalam hal memperoleh informasi. Peran interpersonal di atas Mintzberg merancang peran kedua yang berkaitan dengan informasi ini. Peran ini terdiri dari peran-peran berikut:

1) Peran pemantauan (Monitor), peran ini mengidentifikasi atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Informasi yang diterima atasan dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori berikut:

a) Operasional internal, yaitu informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi, dan segala kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan itu.

b) Peristiwa di luar organisasi (external events), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari pelanggan, hubungan pribadi, pesaing, asosiasi dan segala informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang kesemuanya sangat bermanfaat bagi organisasi.

c) Informasi hasil analisa, segala analisa dan laporan mengenai berbagai permasalahan yang berasal dari berbagai sumber sangat berguna untuk diketahui atasan.

d) Ide dan kecenderungan, atasan memerlukan tujuan untuk mengembangkan pemahaman terhadap kecenderungan yang berkembang di masyarakat, dan mempelajari ide atau pemikiran baru.

- e) Tekanan, atasan juga perlu mengetahui informasi yang dihasilkan dari tekanan pihak tertentu.
 - 2) Sebagai penyebar, peran ini melibatkan atasan untuk menangani proses transmisi informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya.
 - 3) Sebagai juru bicara, peran ini dimainkan oleh manajer untuk menyampaikan informasi di luar lingkungan organisasinya.
- c. Peran Pengambil Keputusan, dalam peran ini atasan harus terlibat dalam proses pengambilan strategi dalam organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg menyimpulkan bahwa pembagian tugas atasan yang besar pada hakikatnya digunakan sepenuhnya untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasi. Keterlibatan ini disebabkan oleh:
- 1) Secara formal, otoritas merupakan satu-satunya pihak yang diperbolehkan terlibat dalam memikirkan tindakan-tindakan penting atau baru dalam organisasi.
 - 2) Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan pengambilan keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan terkini dan nilai-nilai organisasi
 - 3) Keputusan strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan satu orang yang mampu mengendalikan segalanya, Siswanto (2012:21).

Ada empat peran atasan/manajer yang dikelompokkan dalam pengambilan keputusan:

- 1) Peran sebagai wirausaha, dalam peran ini Mintzberg menyatakan bahwa peran wirausaha diawali dengan aktivitas melihat atau memahami secara cermat permasalahan organisasi yang mungkin akan dikerjakan.
- 2) Peran sebagai penangan gangguan, peran ini membawa atasan untuk memikul tanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasi terancam bahaya, misalnya: akan bubar, terkena gosip, isu-isu yang kurang baik, dan sebagainya.
- 3) Berperan sebagai pengalokasi sumber daya, membagi sumber pendanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan. Disini seorang atasan mengambil peran dalam pengambilan keputusan mengenai kemana dana akan disalurkan ke bagian organisasi. Sumber dana tersebut meliputi sumber berupa uang, waktu, persediaan tenaga kerja dan reputasi.
- 4) Peran sebagai negosiator, peran ini meminta atasan untuk berpartisipasi aktif dalam arena negosiasi, Miftah Thoha (2012:12).

Menurut David Berry (2003:105), mengartikan peran sebagai harapan yang dikenakan pada individu yang menduduki posisi sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut bertentangan dengan norma-norma sosial, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranannya ditentukan oleh norma-norma yang ada di masyarakat. Dalam peran ini terdapat dua harapan, yaitu harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan

peran atau kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Menurut Veitzal Rivai (2004:148), peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam kedudukan tertentu. Lebih lanjut menurut Ali (2000:148) peranan adalah sesuatu yang merupakan bagian yang memegang kepemimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi posisi seseorang dalam hierarki organisasi, maka semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam hierarki organisasi, maka semakin penting keterampilan teknis yang dibutuhkan, Siswanto (2012:21).

Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peran mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini merupakan serangkaian aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Ada empat norma yang diakui secara sosial antara lain:
 - a) Metode (Penggunaan); lebih menonjol dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Penyimpangan darinya tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, melainkan hanya kecaman dari individu yang dihubunginya.

- b) Kebiasaan (folkways), sebagai tindakan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa banyak orang menyukai tindakan tersebut.
 - c) Kode etik (mores), merupakan cerminan ciri-ciri kehidupan suatu kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawasan, disadari atau tidak, oleh masyarakat terhadap anggotanya.
 - d) Adat istiadat, merupakan suatu pedoman tingkah laku yang bersifat abadi dan keterpaduannya yang kuat dengan pola tingkah laku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan pengikatnya menjadi suatu adat atau tradisi. (Soejono Soekanto, 2012:174).
- 2) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perilaku individu adalah kegiatan atasan dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, memotivasi dan mengendalikan untuk mengambil keputusan mengenai kesesuaian antar individu, tugas kerja dan efektivitas.

Keputusan-keputusan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu.

Terdapat 4 ciri utama individu, yaitu:

- 1) Persepsi adalah proses pemberian makna terhadap lingkungan yang dilakukan individu.
- 2) Sikap adalah kesiapan mental yang diselenggarakan melalui pengalaman yang mempunyai pengaruh tertentu terhadap respon seseorang terhadap orang, benda, dan situasi yang berkaitan dengan dirinya.
- 3) Kepribadian adalah serangkaian sifat, kecenderungan, dan temperamen yang relatif stabil, yang sebagian besar dibentuk oleh keturunan dan faktor sosial, budaya, dan lingkungan.
- 4) Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai hasil latihan. (Soejono Soekanto, 2012:174).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

2.2.1.2 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Nuramelia (2014:07) Pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai kewenangan mengambil kebijakan berupa pelaksanaan peraturan perundang-undangan di wilayah tertentu yang merupakan wilayah yang dikuasainya. Pemerintahan dalam arti luas diartikan sebagai suatu bentuk organisasi yang mempunyai tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu

badan perkumpulan yang mempunyai kebijakan tersendiri untuk mengatur dan mengatur berjalannya suatu sistem pemerintahan.

Menurut Fatih (2014:13), pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang tertentu. Suradinata dalam Fatih (2014:13), pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan besar dalam suatu negara, meliputi urusan kemasyarakatan, kewilayahan, dan urusan kekuasaan guna mencapai tujuan bernegara. Affan dalam Fatih (2014:13) pemerintahan adalah suatu kegiatan terorganisir mengenai rakyat/penduduk di wilayah negara yang berdasarkan atas dasar negara dan bersumber dari kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk di wilayah itu sendiri.

Pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah seluruh aparatur negara yaitu lembaga-lembaga tinggi negara (MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan BPK). Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah presiden dan staf/aparaturnya yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif, terlepas atau tidak termasuk yang memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. dengan memperhatikan demokrasi, persamaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah, dengan jelas disebutkan bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas Provinsi-Provinsi dan Provinsi-provinsi itu terbagi atas Kabupaten dan Kota, yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.” Sedangkan pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah daerah otonom yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan seluas-luasnya dan berhak mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan dengan undang-undang. urusan pemerintahan pusat.”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan asas Negara Kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dilihat dari pengertian Pemerintahan Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah disini adalah pengelolaan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas desentralisasi dimana unsur-unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah lainnya.

2.2.1.3 Peran Pemerintah Daerah

Menurut Iyas Yusuf (2014:05), fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan adalah mengarahkan kemandirian dan pembangunan masyarakat demi menciptakan kesejahteraan, tidak harus dipaksakan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, sehingga peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah keseimbangan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen pengaturan seluruh kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi hambatan dalam proses pembangunan untuk mendorong dan menjaga dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dengan memberikan insentif dan bimbingan serta arahan yang efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh atau badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam optimalisasi pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang bantuan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan permodalan kepada masyarakat berdaya.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Anggreyni Raintung, dkk (2012:1-9), dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah, konsep peran mengacu pada kedudukan dan fungsi yang dimiliki pemerintah sebagai fasilitator di daerah yang dipimpinnya. Sebagai bagian dari lembaga birokrasi, pemerintah desa dan kecamatan pada dasarnya mempunyai beberapa peran dalam melaksanakan tugas pemberdayaannya. Beberapa peran tersebut antara lain :

- a. Peran Regulator adalah menyiapkan arahan untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur seluruh pelaksanaan pemberdayaan.
- b. Peran Dinamisator yaitu mendorong partisipasi masyarakat jika terjadi hambatan dalam proses pembangunan, mendorong dan memperhatikan dinamika pembangunan dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat.

- c. Peran Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan program pembangunan yang diwujudkan melalui bidang pendampingan dan bidang permodalan.
- d. Peran Katalisator adalah sebagai agen percepatan pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian dapat menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Peranan Pemerintah Daerah adalah suatu kompleks penghargaan Pemerintah Daerah terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan dan kewenangan Pemerintah Daerah. Yang meliputi Regulator, Dinamisator, Fasilitator dan Katalisator.

2.2.2 Kualitas Produk

2.2.2.1 Pengertian Kualitas Produk

Kualitas produk adalah kondisi fisik, fungsi dan sifat suatu produk, baik barang atau jasa, berdasarkan tingkat kualitas yang diharapkan seperti daya tahan, keandalan, keakuratan, kemudahan pengoperasian, perbaikan produk dan atribut produk lainnya dengan tujuan memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan.

Kualitas produk menjadi salah satu kunci persaingan antar pelaku usaha yang ditawarkan kepada konsumen. Konsumen selalu ingin mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayarnya, meskipun ada sebagian

orang yang beranggapan bahwa produk yang mahal adalah produk yang berkualitas. Jika perusahaan dapat menerapkan hal tersebut, maka perusahaan akan dapat terus memuaskan konsumen dan meningkatkan jumlah konsumen.

Kualitas produk merupakan suatu hal penting yang harus diperjuangkan oleh setiap perusahaan jika ingin produknya mampu bersaing di pasaran. Adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dan konsumen akan memberikan peluang untuk mengetahui dan memahami apa saja kebutuhan dan harapan dalam persepsi konsumen. Jadi, perusahaan penyedia produk dapat memberikan kinerja yang baik untuk mencapai kepuasan konsumen dengan cara memaksimalkan pengalaman yang menyenangkan dan meminimalkan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk.

Berikut pengertian dan pengertian kualitas produk dari beberapa sumber buku:

- 1) Menurut Kotler dan Armstrong (2012), kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsinya, hal ini mencakup keseluruhan daya tahan, keandalan, keakuratan, kemudahan pengoperasian, dan perbaikan produk, serta atribut produk lainnya.
- 2) Menurut Nasution (2005), kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, orang/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan konsumen.

- 3) Menurut Tjiptono (2012), kualitas produk adalah tingkat kualitas yang diharapkan dan mengendalikan keragaman dalam mencapai kualitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
- 4) Menurut Prawirosentono (2002), kualitas produk adalah keadaan fisik, fungsi dan ciri-ciri suatu produk yang bersangkutan yang dapat memuaskan selera dan kebutuhan konsumen sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan.

Menurut Kotler dan Keller (2012), kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai atau bahkan melebihi apa yang diinginkan pelanggan.

2.2.2.2 Manfaat Kualitas Produk

Menurut Ariani (2003), ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan menciptakan produk yang berkualitas baik, yaitu:

- 1) Meningkatkan reputasi perusahaan. Suatu perusahaan atau organisasi yang telah menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas akan mendapat predikat sebagai organisasi yang mengutamakan kualitas, oleh karena itu perusahaan atau organisasi tersebut dikenal masyarakat luas dan mendapat nilai lebih di mata masyarakat.
- 2) Biaya lebih rendah. Untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, perusahaan atau organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan atau organisasi berorientasi pada (kepuasan pelanggan), yaitu dengan mendasarkan

jenis, jenis, waktu dan jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen.

- 3) Meningkatkan pangsa pasar. Pangsa pasar akan meningkat jika minimalisasi biaya tercapai, karena organisasi atau perusahaan dapat menekan harga, padahal kualitas tetap menjadi yang utama.
- 4) Dampak internasional. Jika Anda mampu menawarkan produk atau jasa yang berkualitas, maka selain dikenal di pasar lokal, produk atau jasa tersebut juga akan dikenal dan diterima di pasar internasional.
- 5) Ada tanggung jawab produk. Dengan semakin ketatnya persaingan terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, maka organisasi atau perusahaan dituntut untuk semakin bertanggung jawab terhadap perancangan, proses dan pendistribusian produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
- 6) Untuk penampilan produk. Kualitas akan membuat produk atau jasa tersebut dikenal, dalam hal ini akan membuat perusahaan yang memproduksi produk tersebut juga dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas.

Menyadari kualitas yang dirasakan adalah penting. Persaingan kini bukan lagi soal harga melainkan kualitas produk, hal inilah yang mendorong konsumen ingin membeli produk dengan harga mahal namun berkualitas pula.

2.2.2.3 Dimensi Kualitas Produk

Menurut Gaspersz (2008), dimensi kualitas produk adalah sebagai berikut:

1) Kinerja (performance)

Kinerja adalah karakteristik operasi dasar dari suatu produk inti dan dapat didefinisikan sebagai penampilan produk sebenarnya. Kinerja suatu produk merupakan cerminan bagaimana suatu produk disajikan atau ditampilkan kepada konsumen. Tingkat pengukuran kinerja pada dasarnya mengacu pada tingkat karakteristik dasar di mana produk beroperasi. Suatu produk dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila memenuhi harapan. Untuk setiap produk/jasa, dimensi kinerjanya bisa berbeda-beda, tergantung nilai fungsional yang dijanjikan perusahaan. Untuk bisnis makanan, dimensi kinerjanya adalah cita rasa yang baik.

2) Keandalan (reliability)

Keandalan merupakan tingkat kesulitan suatu produk atau konsistensi kehandalan suatu produk dalam proses operasionalnya di mata konsumen. Keandalan suatu produk juga merupakan ukuran kemungkinan suatu produk tidak rusak atau gagal dalam jangka waktu tertentu. Suatu produk dikatakan memiliki keandalan yang tinggi apabila mampu menarik kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keandalan suatu produk. Dimensi performa dan kehandalan sekilas hampir sama namun memiliki perbedaan yang jelas. Keandalan menunjukkan kemungkinan produk menjalankan fungsinya.

3) Keistimewaan tambahan (feature)

Fitur merupakan karakteristik sekunder atau pelengkap dan dapat diartikan sebagai tingkat kelengkapan atribut suatu produk. Pada titik tertentu, performa masing-masing merek hampir sama namun perbedaannya terletak pada fiturnya. Hal ini juga mengakibatkan ekspektasi konsumen mengenai dimensi kinerja relatif homogen dan ekspektasi mengenai fitur relatif heterogen.

4) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications)

Kesesuaian adalah sejauh mana karakteristik desain dan pengoperasian memenuhi standar yang telah ditentukan dan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi target yang dijanjikan. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kesesuaian suatu produk dikatakan akurat apabila produk yang dipasarkan oleh produsen sesuai dengan rencana perusahaan yang berarti merupakan produk yang diinginkan sebagian besar konsumen.

5) Daya tahan (durability)

Daya tahan berkaitan dengan berapa lama produk dapat terus digunakan dan dapat didefinisikan sebagai ukuran perkiraan umur pengoperasian produk dalam kondisi normal. Dimensi ini meliputi umur teknis dan umur ekonomis. Semakin besar frekuensi penggunaan konsumen terhadap suatu produk, maka semakin besar pula daya tahan produk tersebut.

6) Kemampuan melayani (service ability)

Kemampuan pelayanan meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, kemudahan perbaikan, dan penanganan keluhan yang memuaskan dan dapat diartikan sebagai ukuran kemudahan perbaikan suatu produk yang rusak atau gagal. Artinya apabila suatu produk mengalami kerusakan atau gagal maka kesiapan perbaikan produk tersebut dapat diandalkan, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.

7) Estetika (Aesthetics)

Estetika merupakan keindahan suatu produk bagi panca indera dan dapat diartikan sebagai atribut-atribut yang melekat pada suatu produk, seperti warna, model atau desain, bentuk, rasa, aroma dan lain sebagainya. Pada dasarnya estetika merupakan unsur pelengkap fungsi dasar suatu produk sehingga performa suatu produk akan lebih baik dihadapan konsumen.

8) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality)

Perceived quality merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Biasanya karena kurangnya pengetahuan pembeli tentang atribut atau karakteristik produk yang akan dibeli, pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama merek, periklanan, reputasi perusahaan, dan negara produsen.

2.2.2.4 Tingkatan Kualitas Produk

Menurut Arif (2012), terdapat lima tingkat kualitas produk, yaitu:

- 1) Manfaat Inti (Manfaat Inti). Yaitu jasa atau manfaat inti sebenarnya yang dibeli dan diperoleh konsumen. Kebutuhan konsumen yang paling mendasar adalah manfaat, dan ini merupakan tingkat paling mendasar dari suatu produk. Seorang pemasar harus mampu melihat dirinya sebagai sosok yang memberikan manfaat kepada konsumen. Jadi konsumen pada akhirnya akan membeli produk tersebut karena manfaat inti yang dikandungnya.
- 2) Manfaat dasar tambahan (Produk Dasar). Tingkat selanjutnya, seorang pemasar harus mampu mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Inti dari produk adalah manfaat yang berupa bentuk dasar produk atau mampu memenuhi fungsi dasar produk yang dibutuhkan konsumen yaitu fungsional.
- 3) Harapan produk (Expected Product). Merupakan rangkaian kondisi yang diharapkan dan disukai oleh atribut produk. Kebutuhan konsumen adalah kelayakan. Misalnya pada jasa perhotelan, harapan konsumen adalah kenyamanan untuk beristirahat dan menghilangkan penat dari segala aktivitas yang dilakukan.
- 4) Keunggulan produk (Augmented Product). Itulah salah satu manfaat dan layanan yang dapat membedakan produk dengan kompetitor. Kebutuhan konsumen adalah kepuasan. Misalnya perbankan yang menyediakan produk tabungan terencana, dimana pada produk ini

nasabah dapat menyimpan dan menginvestasikan dananya sekaligus mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dan kesehatan dengan membayar premi tambahan tertentu. Keunggulan dari penawaran produk inilah yang dicari pelanggan.

Potensi masa depan produk (Potential Product). Artinya bagaimana ekspektasi kedepannya terhadap produk ini jika terjadi perubahan dan perkembangan teknologi dan selera konsumen. Kebutuhan konsumen adalah masa depan produk. Misalnya kemudahan membayar tagihan telepon, listrik, air atau lainnya.

2.2.2.5 Perspektif Kualitas Produk

Perspektif kualitas produk merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa dengan maksud yang diharapkan atau diinginkan konsumen. Menurut Tjiptono (2012), ada lima jenis perspektif kualitas produk, yaitu:

1) Transcendental approach

Kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan atau diketahui namun sulit untuk didefinisikan dan dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam musik, drama, tari, dan seni rupa. Selain itu, perusahaan dapat mempromosikan produknya dengan pertanyaan seperti tempat berbelanja yang menyenangkan (supermarket), keanggunan (mobil), kecantikan wajah (kosmetik), kelembutan dan kehalusan kulit (sabun mandi), dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat sulit bagi fungsi perencanaan, produksi, dan layanan suatu

perusahaan untuk menggunakan definisi ini sebagai dasar manajemen mutu.

2) Product-based approach

Pendekatan ini memandang kualitas sebagai suatu karakteristik atau atribut yang dapat dikuantifikasi dan dapat diukur. Perbedaan kualitas mencerminkan perbedaan jumlah beberapa elemen atau atribut yang dimiliki suatu produk. Karena pandangan ini sangat objektif, maka pandangan ini tidak dapat menjelaskan perbedaan selera, kebutuhan, dan preferensi individu.

3) User-based approach

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang mempersepsikannya, dan produk yang paling memenuhi acuan seseorang (misalnya kualitas yang dirasakan) adalah produk dengan kualitas yang paling tinggi. Perspektif subjektif dan berorientasi pada permintaan juga menyatakan bahwa setiap pelanggan mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi seseorang sama dengan kepuasan maksimal yang dirasakan. Kepuasan seseorang tentu akan berbeda-beda, begitu pula pandangan seseorang terhadap kualitas suatu produk. Sebuah produk yang dapat memenuhi keinginan dan kepuasan seseorang, belum tentu dapat memenuhi kepuasan orang lain.

4) Manufacturing-based approach

Perspektif ini berbasis pasokan dan terutama berkaitan dengan praktik teknik dan manufaktur, serta mendefinisikan kualitas setara dengan persyaratan. Di sektor jasa, dapat dikatakan bahwa kualitas didorong oleh operasi. Pendekatan ini berfokus pada mengadaptasi spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang sering kali didorong oleh tujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Jadi yang menentukan kualitas adalah standar yang ditetapkan oleh perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya.

5) Value-based approach

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas diartikan sebagai keunggulan yang terjangkau. Kualitas dalam perspektif ini bersifat nilai relatif, sehingga produk dengan kualitas tertinggi belum tentu merupakan produk dengan nilai tertinggi. Namun, yang paling bernilai adalah produk atau jasa yang paling pantas untuk dibeli

2.2.2.6 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Produk

Menurut Prawirosentono (2002), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk, yaitu:

- 1) Manusia, Sumber daya manusia merupakan elemen utama yang memungkinkan terjadinya proses penambahan nilai.
- 2) Metode, Hal ini mencakup prosedur kerja dimana setiap orang harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada

masing-masing individu. Cara ini merupakan prosedur kerja yang terbaik agar setiap orang dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

- 3) Mesin, Mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses menambah nilai output. Penggunaan mesin sebagai peralatan penunjang pembuatan suatu produk memungkinkan terjadinya berbagai variasi bentuk, jumlah dan kecepatan proses penyelesaian pekerjaan.
- 4) Bahan, Jenis bahan baku yang diolah dalam produksi untuk menghasilkan nilai tambah menjadi output sangat beragam. Keberagaman bahan baku yang digunakan juga akan mempengaruhi nilai keluaran yang beragam.
- 5) Ukuran, Pada setiap tahapan produksi harus ada suatu ukuran sebagai standar penilaian agar kinerjanya dapat dinilai pada setiap tahapan produksi. Kemampuan standar pengukuran tersebut merupakan faktor penting untuk mengukur kinerja seluruh tahapan proses produksi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana.

Lingkungan, Lingkungan dimana proses produksi berada sangat mempengaruhi hasil atau kinerja proses produksi. Jika lingkungan kerja berubah, maka kinerja pun ikut berubah. Banyak sekali faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kelima unsur tersebut di atas sehingga dapat menimbulkan variasi dalam tugas kerja.

2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Produksi Kopi Papua

Papua telah menjadi daerah penghasil kopi yang terkenal sejak tahun 1950an. Ratu Wilhelmina bahkan membuat perjanjian mengenai hasil perkebunan termasuk kopi dari pulau tersebut. Sempat redup, kini penampakan kopi Papua kembali terlihat. Kemungkinan kopi tersebut dibawa oleh pemerintah Belanda atau misionaris yang bertugas di Papua. Surat kabar Sumatra Post, 20 April 1929, dan surat kabar Het Nieuws, 11 Maret 1929, serta dokumen lain menyebutkan kopi Robusta ditanam oleh Zending DC Bout di Ambaidiru, Kepulauan Yapen. Arabika diperkirakan pertama kali tiba pada tahun 1890-an. Pasca Perang Dunia II, Belanda mengencarkan pembangunan di Papua, termasuk budidaya kopi. Sebuah pusat pembibitan dan sekolah pertanian dibangun di Sentani. Penanaman kopi pun meluas ke sejumlah daerah. Pada tahun 1956 meningkat menjadi 100 ton. Kemudian pada tahun 1959 meningkat menjadi 970 ton. Perkembangan kopi terus berlanjut. Masuknya para misionaris pun memperluas jangkauan kopi di negeri itu (Papua). Mereka membawa kopi dari Lembah Kamu ke Paniai. Di sana, warga mendapat bantuan pangan dan bibit kopi dari para misionaris. Pasar kopi juga dibuka karena hasil panen diangkut melalui pesawat yang membawa misionaris yang bertugas. Kopi juga masuk ke Lembah Baliem, ditanam di sekitar Sungai Baliem (Sungai Baliem).

Saat itu, sebagian besar petani belum memiliki keterampilan mengolah kopi. Pendistribusian biji kopi mengarah pada usaha pengolahan kopi yang dikelola oleh pengusaha Tiongkok. Salah satu pabriknya berada di Wamena. Dari sana, bubuk kopi olahan didistribusikan ke toko-toko lokal. Sisanya dipasok ke

Jayapura dan Jakarta. Pada tahun 1970an hingga 1980an, Moanamani menjadi produsen kopi Papua. Generasi Papua di Lembah Kamu akhirnya tidak lagi mengakui kopi sebagai bagian dari penunjang kehidupan (Kompas, 25 April 2018:25). Kopi yang masuk ke Modio (salah satu daerah pedalaman pegunungan tengah yang pertama kali dimasuki para misionaris) adalah varietas Arabika. Typika merupakan varietas yang pertama kali didatangkan VOC ke Pulau Jawa pada abad ke-17. Keanekaragamannya hampir punah di Pulau Jawa, bahkan banyak ditemukan di Pegunungan Tengah Papua yang beriklim sejuk di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Pohon kopi yang khas tumbuh subur di pegunungan.

Sejarah kopi Papua menegaskan bahwa kopi Papua mempunyai peluang karena cita rasa kopi Papua mempunyai keunikan (ciri khas tersendiri) bagi para pecinta kopi tanah air, karena salah satu varietas dari salah satu spesies unggulan dunia ini masih melimpah di wilayah tengah. wilayah pegunungan Papua, ketika wilayah lain di nusantara mulai kehilangan keanekaragamannya.

Kopi Papua dalam artikel ini terdiri dari dua referensi, yaitu (1) Kopi Papua adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu merek kopi Papua yang telah diproduksi, dikemas dan disajikan dalam dunia industri kreatif. Kopi Papua memberikan konsep atau gambaran tentang nama besar kopi Papua sehingga mampu memenangkan persaingan di pasar kopi Indonesia, dan (2) sebagai produk perkebunan yang dibudidayakan, diolah dan diproduksi langsung dari Tanah Papua. Perkebunan kopi Papua tersebar di wilayah pegunungan Papua yang beriklim sejuk pada ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Ada lebih

dari 90 spesies kopi di dunia. Dari seluruh jenis kopi, hanya 25 jenis yang paling komersial untuk diambil buahnya, dan hanya 4 jenis yang mempunyai posisi terdepan dalam perdagangan biji kopi, yaitu arabika, robusta, liberika dan excelsa (Raharjo, 2012:12). Terdapat 2 jenis kopi Papua yang terkenal yaitu Arabika dan Robusta yang berhasil dibudidayakan di Papua sejak zaman Belanda di Indonesia hingga saat ini.

2.2.4 Kendala-Kendala Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, yang berarti pemerintah harus mampu meningkatkan pendapatannya dengan cara memberikan kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, termasuk rasa. keamanan dan perlindungan di lingkungan tempat mereka tinggal.

Perbedaan antar daerah menjadi permasalahan dalam pembangunan perekonomian daerah, hal inilah yang menjadi kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan perannya. Menurut Subandi (2005:117), yaitu:

1) Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri

Kegiatan perekonomian pada setiap daerah akan berbeda-beda, tingginya konsentrasi kegiatan perekonomian pada daerah tertentu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi pada daerah dengan konsentrasi ekonomi tinggi cenderung cepat, sedangkan pada daerah

dengan konsentrasi ekonomi rendah cenderung tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonominya rendah.

Industri manufaktur merupakan salah satu sektor perekonomian yang berpotensi sangat produktif, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDB atau PDRB. Terjadinya ketimpangan perkembangan sektor industri atau tingkat industrialisasi antar wilayah menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan perekonomian antar wilayah. Minimnya berkembangnya sektor industri di luar Pulau Jawa menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dengan wilayah di Pulau Jawa. Daerah di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan Timur, Papua bisa menjadi daerah yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor industri manufaktur. Hal ini terlihat dari dua hal yaitu ketersediaan bahan baku dan letak geografis yang dekat dengan negara tetangga, pasar yang besar selain pasar dalam negeri.

2) Kurang Meratanya Investasi

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, Harrod-Domar menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga kurangnya investasi pada suatu daerah menjadikan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat suatu daerah. daerah itu rendah. Hal ini disebabkan tidak adanya kegiatan ekonomi produktif seperti industri. Dari sisi industri, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dominan penanaman modal dalam

negeri yakni hampir 66%, dan penanaman modal asing hampir 76%, sedangkan di luar Jawa rata-rata penanaman modalnya kurang dari 5%, kecuali Pulau Sumatera yang masih di atas 10% (BPS sumber data).

3) Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah

Kurang lancarnya mobilitas faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapasitas antar wilayah juga menjadi penyebab ketimpangan perekonomian wilayah. Hal ini disebabkan karena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar wilayah menimbulkan perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar wilayah, dengan asumsi mekanisme pasar output dan input bebas sehingga mempengaruhi mobilitas faktor produksi antar wilayah. Menurut A. Lewis dalam Lincoln Arsyad (2000), apabila tidak ada hambatan dalam transfer faktor produksi antar daerah, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi antar daerah akan tercapai secara optimal dan seluruh daerah akan menjadi lebih baik.

4) Perbedaan Sumber Daya Alam

Pemikiran klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera dibandingkan dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Sampai batas tertentu pendapat tersebut dapat dibenarkan, dalam artian sumber daya manusia hanya dipandang sebagai modal awal pembangunan, kemudian harus dikembangkan terus menerus, oleh karena itu diperlukan faktor-faktor lain antara lain faktor teknologi dan sumber daya manusia. Dengan penguasaan teknologi dan peningkatan

kualitas sumber daya manusia, lambat laun faktor endowment tidak lagi relevan. Hal ini bisa kita lihat di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura yang sangat miskin sumber daya alamnya.

5) Perbedaan Demografis

Ketimpangan perekonomian regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antar wilayah. Kondisi ini mempengaruhi jumlah dan pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin dan etos kerja. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran

Dari sisi permintaan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pertumbuhan pasar yang besar sehingga menjadi faktor pendorong tumbuhnya kegiatan perekonomian. Di sisi penawaran, jumlah penduduk yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplin dan etos kerja yang tinggi merupakan aset penting bagi produksi.

6) Kurang Lancarnya Perdagangan Antar Daerah

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terciptanya ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah disebabkan oleh terbatasnya transportasi dan komunikasi. Jadi tidak meratanya arus barang dan jasa antar wilayah dipengaruhi oleh perkembangan dan

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari sisi permintaan dan penawaran

Dari sisi permintaan, kelangkaan barang dan jasa bagi konsumen mempengaruhi permintaan pasar terhadap kegiatan ekonomi lokal yang bersifat komplementer terhadap barang dan jasa tersebut. Sedangkan dari sisi penawaran, sulitnya memperoleh barang model, bahan setengah jadi, bahan baku atau bahan lainnya dapat menyebabkan kegiatan perekonomian di suatu daerah menjadi lumpuh atau tidak berjalan secara maksimal.

2.3 Kerangka Berfikir Penelitian

Kerangka berfikir adalah konseptual atau model teori yang saling berkaitan terhadap faktor-faktor yang telah dikenali sebagai masalah penting. Kerangka berpikir banyak digunakan untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis, baik penulisan kreatif maupun penelitian. Kerangka berpikir merupakan suatu gagasan dasar yang memuat teori, fakta, observasi dan studi literatur yang menjadi dasar penulisan suatu karya tulis.

Kerangka berpikir merupakan landasan penelitian yang memuat perpaduan antara teori, observasi, fakta, dan tinjauan pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan penulisan ilmiah. Oleh karena itu, terciptalah kerangka pemikiran pada saat menjelaskan konsep penelitian. Kerangka berpikir juga dapat dianggap sebagai visualisasi dalam bentuk diagram yang saling berhubungan. Dengan demikian, kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai suatu alur logis yang mengalir melalui penelitian. Namun,

kerangka acuan ilmiah juga dapat terdiri dari poin-poin yang sesuai dengan variabel.

Dalam kerangka pemikiran, variabel-variabel penelitian dapat dijelaskan lebih mendalam dan relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini terkait dengan Peranan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangannya dalam meningkatkan Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat dari Iyas Yusuf (2014:05), bahwa peranan pemerintah meliputi : Sebagai regulator, Sebagai dinamisator dan Sebagai fasilitator. Dalam hal ini adalah Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo.

Sedangkan Kualitas produk adalah bagaimana kualitas kopi Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo dengan tujuan memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat dari Prawirosentono (2002), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk, yaitu: Manusia, Metode, Mesin, Bahan, Ukuran, dan Lingkungan.

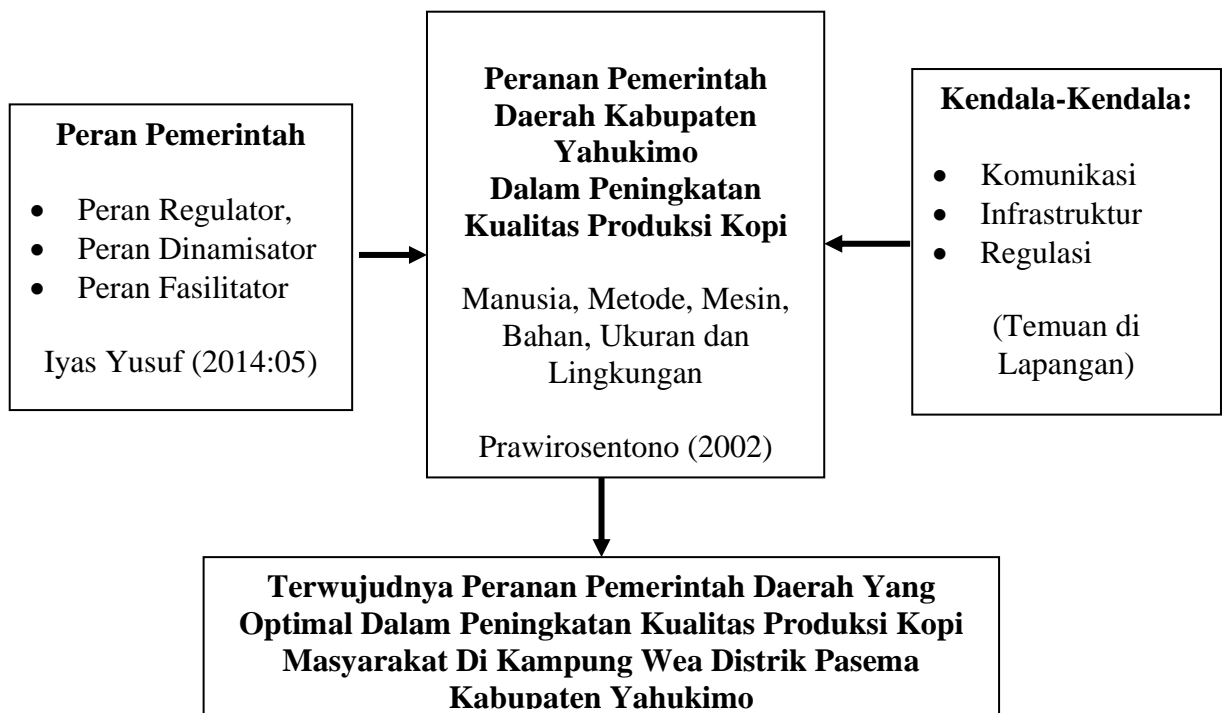
Kemudian terkait dengan kendala peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo seperti yang disampaikan oleh Subandi (2005:117), yaitu: Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri, Kurang

Meratanya Investasi, Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah, Perbedaan Sumber Daya Alam, Perbedaan Demografis, dan Kurang Lancarnya Perdagangan Antar Daerah.

Untuk mengetahui kerangka berfikir penelitian ini sebagaimana bagan berikut:

Bagan 2.1
Kerangka Berfikir Penelitian

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

2.4 Definisi Variabel Penelitian

2.4.1 Definisi Konsep

Untuk mencegah salah satu interpretasi atas istilah khususnya variabel penelitian, maka diuraikan dalam definisi konsep sebagai berikut :

1. Peranan Pemerintah Daerah adalah suatu kompleks penghargaan Pemerintah Daerah terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.
2. Kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai atau bahkan melebihi apa yang diinginkan pelanggan.

2.4.2 Definisi Operasional

Dengan definisi operasional yang jelas, penelitian akan dapat lebih mudah mengukur dan menganalisis Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung dan faktor yang mendukung dan menghambatnya.

1. Menurut Iyas Yusuf (2014:05), fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan adalah mengarahkan kemandirian dan pembangunan masyarakat demi menciptakan kesejahteraan, tidak harus dipaksakan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, sehingga peran pemerintah yang dimaksud antara lain:
 - a. Pemerintah sebagai Regulator
 - b. Pemerintah sebagai Dinamisator
 - c. Pemerintah sebagai Fasilitator

2. Menurut Prawirosentono (2002), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk, yaitu:

- a. Manusia
- b. Metode
- c. Mesin
- d. Bahan
- e. Ukuran